BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia masih terbilang rendah. Hal ini dikarenakan oleh krisis ekonomi di Indonesia yang memberikan dampak yang cukup besar. Tak hanya bagi pemerintah, namun juga berdampak pada pengusaha bahkan masyarakat. Hal ini terbukti dari para pengusaha yang tidak bisa berkembang atau bahkan gulung tikar karena tingginya bunga dan pajak yang ditetapkan (ali arto, 2013 : 98). Masyarakat pun juga merasakan dampak dari hal tersebut, yakni masih tingginya tingkat pengangguran. Pada Agustus 2017 jumlah pengangguran bertambah 10 ribu orang, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun sebesar 0,11 poin dan dari 121,02 juta orang yang bekerja, sebesar 7,55 persen masuk kategori setengah menganggur dan 20,40 persen pekerja paruh waktu. Dalam setahun terakhir, setengah pengangguran turun sebesar 0,03 poin, sementara pekerja paruh waktu naik sebesar 0,76 poin (data BPS 2017).

Penurunan tingkat pengagguran masih tergolong minim. Namun tidak berarti pemerintah tidak bisa meningkatkan penurunan jumlah pengangguran. Salah satu cara untuk mengakali penurunan jumlah pengangguran adalah mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM). UKM adalah salah satu potensi daerah di Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian negara. Selain mampu mendongkrak perekonomian negara, keberadaan UKM mampu mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut dan mengembangkan potensi-potensi daerah yang lain.

Mengingat peran UKM yang begitu penting, tetapi masih tidak dapat lepas dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat pertumbuhan dari UKM tersebut. Masalah yang sering menghambat pertumbuhan UKM adalah kurang atau tidak adanya modal, sumber

daya manusia yang kurang memadai karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman serta kurang efektivitasnya dalam pengolahan dan pemberdayaan potensi. Adapun masalah lain yang dihadapi oleh pelaku UKM selain dari modal dan SDM, adalah seperti kurangnya bahan baku tata cara pengolahan, pemasaran hingga penggunaan teknologi yang masih tergolong kurang. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan tentang tata cara pengelolahan UKM yang professional.

Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah sangatlah penting dimana UKM ini merupakan pilar utama dalam tolak ukur pembangunan nasional yang merata. Untuk mempertahankan keberadaan dan peran dari usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, haruslah ada faktor-faktor pendukung (JAP, Heti Kusama W. Dkk : 219) seperti; *pertama* adanya oganisasi dari dinas koperasi yang jelas dan terintegrasi untuk mengembangkan potensi UKM. *Kedua*, dukungan dari pemerintah untuk selalu menggiring masyarakat agar terus mampu bersaing dengan UKM yang ada. Ketiga, perlindungan yang telah dibuat oleh pemerintah yang benar-benar ditaati dan tidak merugikan masyarakat yang mempunyai UKM serta keempat, pengembangan yang dilakukan baik oleh pemerintah, badan usaha, mitra kerja ataupun masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor pendukung tersebut sebaiknya ada dan terus di jalakan untuk meningkatkan efektivitas dan perkembangan dari UKM tersebut tanpa mengesampingkan kepentingan negara yang lain. Macam-macam UKM yang ada di Indonesia antara lain: bidang pertanian atau cocok tanam, perikanan, peternakan, perkebunan, jasa hingga komunikasi dan sebagainya. Dimana semua bidang UKM tentu memiliki peran yang penting untuk masyarakat terutama untuk sandang dan pakan. Terdapat 248.802 UMKM di Pasuruan kabupaten dan 24.257 UKM di Pasuruan Kota yang berdiri dan berjalan (data Diskopukm). Terdapat 144.464 usaha dibidang pertanian dan 104.338 usaha dibidang non pertanian di Pasuruan Kabupaten. Sedangkan untuk UMKM sendiri, terdapat 237.353

usaha mikro, 10.564 usaha kecil dan 885 usaha menengah dengan total jumlah 248.802 UMKM di Pasuruan Kabupaten (data rekap Diskopukm).

Beberapa UKM yang telah ada di pandaan antara lain Industri kecil sepatu, industri kecil boneka, industri kecil jilbab, dan beberapa Industri makanan jajanan khas untuk oleh-oleh dari pandaan dan sebagainya. Beberapa diantara UKM tersebut telah berkembang dan beberapa alagi akan dikembangkan dalam bentuk pasar wisata yang di dirikan oleh pemkab pasuruan, sedangkan sisanya akan dikembangkan lebih lanjut.

Beberapa UKM yang masih belum tersentuh oleh pemerintah merupakan UKM yang dikelola sendiri oleh rumah tangga dengan modal yang terbatas. Sehingga pelaku-pelaku UKM yang seperti ini akan sangat kesulitan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produksi karena terbatasnya modal. Seperti para pelaku UKM yang lainpun secara nasioanl juga memiliki masalah utama yang sama, yakni kurangnya modal yamg diberikan untuk membeli bahan baku atau meningkatkan produksinya.

Salah satu wadah yang dapat menampung dan membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah UKM adalah koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang memiliki fungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UKM. Sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2012 pasal 1 yang berbunyi Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan adalah salah satu wujud badan Pemerintah pelayanan publik *(Public Services)* yang memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian pelayanan publik atau *Public Services* itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau organisasi

ataupun instansi yang memberikan jasa pelayanan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka perlu diketahui bahwa bagaimana peran-peran badan birokrasi dalam hal ini Dinas koperasi dan UKM kabupaten Pasuruan, dimana salah satu perannya adalah pelayan publik. Pelayanan yang diberikan bisa secara administratif maupun secara langsung atau partisipatif kepada masyarakat. Pelayanan publik tak hanya berhenti sampai pada Dinas Koperasi saja, namun juga di terapkan pada koperasi-koperasi dibawah binaannya, karena pada hakekatnya, Dinas koperasi adalah fasilitator dan perwakilan dari pemerintah pusat UKM. Dengan demikian, koperasi adalah suatu badan usaha yang menjadi salah satu pelayan publik yang memiliki fungsi agar membantu dan memudahkan persoalan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai badan usaha rakyat, koperasi didirikan dengan berasazkan kekeluargaan dengan mengutamakan persaudaraan dan solidaritas dari dan antar angotanya. Sesuai dengan UU no 17 tahun 2012 pasal 4 bahwa koperasi Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Keberadaan koperasi telah dilindungi oleh Undang-Undang dan dibawah naungan pemerintah. Dengan adanya hukum dan tujuan yang jelas, seharusnya koperasi mampu menjalankan kegiatan dalam organisasinya dengan baik dan mencapai tujuan yang telah di atur dalam perundang-undangan. Namun dalam kenyataanya, masih banyak koperasi binaan pemerintah yang nonaktif dan gulung tikar. Adapula koperasi yang berjalan namun menganut sistem kapitalis dimana koperasi tersebut memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Tentu saja, ini sangat merugikan masyarakat dan tidak sejalan dengan tujuan utama koperasi yakni memberikan kemudahan dan bantuan untuk kesejahteraan bagi masyarakat.

Jumlah koperasi binaan di Jawa timur, terutama di Pasuruan sangatlah banyak. Namun dengan banyaknya jumlah koperasi belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berikut data keragaan koperasi di jawatimur yang berada dibawah binaan pemerintah :

DATA KERAGAAN KOPERASI

PERKEMBANGAN KERAGAAN KOPERASI			
NO	**URAIAN**	**SATUAN**	**DESEMBER 2015**
1	Total Koperasi		31.182
	a. Koperasi Aktif	Unit	27.472
	b. Koperasi Tdk Aktif	Unit	3.710
2	Anggota	Org/Kop	7.622.390
3	RAT	Kop	12.343
4	Manager	Orang	7.846
5	Karyawan	Orang	149.047
6	Modal Sendiri	Rp.000	17.205.631.627
7	Modal Luar	Rp.000	39.590.073.540
8	Total Asset	Rp.000	56.795.705.167
9	Volume Usaha	Rp.000	117.194.308.403
10	S H U	Rp.000	103.574.580.677

Sumber data : diskopukm.jatimprov

Terdapat 847 unit koperasi yang aktif dan 72 unit koperasi yang sudah tidak aktif di Pasuruan Kabupaten dengan total keseluruhan 919 unit koperasi. Sedangkan di Pasuruan Kota terdapat 253 unit koperasi yang masih aktif dan 74 unit koperasi yang telah tidak aktif dengan total 327 unit koperasi.

Berikut adalah data tentang jumlah koperasi primer dan sekunder di Jawa timur, sebagai berikut :

Koperasi Sekunder	
Tingkat Gabungan	2 Unit
Tingkat Pusat KUD	2 Unit
tingkat pusat non KUD	68 Unit
Tingkat Primer Propinsi	
Koperasi Non KUD	443 Unit
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	63 Unit

Sumber data: diskopukm.jatimprov

Berdasarkan data yang telah ada, koperasi yang didirikan di Jawa Timur cukup banyak, begitu pula anggota yang ikut dalam koperasi tersebut. Namun dalam kenyataanya, dengan jumlah koperasi yang ada dan aktif hingga saat ini, masih banyak pelaku UKM yang merasa tidak terbantu bahkan merugi dengan berbagai sebab.

Kualitas pelayanan publik adalah hal utama yang patut diperhatikan. Sebagai badan usaha rakyat yang mengemban tugas dalam membantu dan mempermudah permasalahan ekonomi masyarakat khususnya para pelaku UKM, koperasi seyogyanya mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Pun sebagai badan usaha yang berada dibawah hukum, koperasi memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang ekonomi agar tingkat perekonomian masyarakat di daerah tersebut dapat meningkat dan memiliki kehidupan yang sejahtera.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang peranan koperasi terhadap UKM dan penelitian ini diberi judul

PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PASURUAN DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan, maka dapat dketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan dalam pengembangan koperasi dan UKM?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan dalam pengembangan koperasi dan UKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut, maka peneliti diharapkan mampu mengetahui :

1. Peran Dinas koperasi dan UKM dalam pengembangan koperasi dan UKM
2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan dalam pengembangan koperasi dan UKM?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dalam meningkatkan pengetahuan maupun manfaat praktis dalam rangka memecahkan masalah aktual.

1. Manfaat praktis

a. Untuk menambah wawasan ilmu dan pustaka baik dalam program, fakultas maupun universitas

b. Sebagai dasar peneliti untuk penelitian berikutnya

2. Manfaat teoritis

a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan

b. Dapat memberikan masukan dan menjadi pedoman bagi pengurus koperasi dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan UMKM